

# Etikalitas Politisi Muda Yang Korup Berdampak Krisis Negarawan

Mic Finanto Ario Bangun <sup>1,\*</sup>, Ratna Indriasari <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Psikologi; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; e-mail:  
[mic.finanto@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:mic.finanto@dsn.ubharajaya.ac.id)

<sup>2</sup> Prodi Ilmu Pemerintahan; Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara; e-mail:  
[ratna.indriasari@stipan.ac.id](mailto:ratna.indriasari@stipan.ac.id)

\* Korespondensi: e-mail: [mic.finanto@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:mic.finanto@dsn.ubharajaya.ac.id)

Submitted: **26/11/2023**; Revised: **27/12/2023**; Accepted: **26/02/2024**; Published: **31/03/2024**

## Abstract

*This nation is experiencing a leadership crisis, the rise of young leaders who emerged in the reform era, most of them have the mentality of politicians. Political leadership with a politician's mentality is more calculating about profit and loss, dividing power, securing political power on the other hand. There is no day without news of corruption on various social media, both related to the success of the Corruption Eradication Committee (KPK) in carrying out the Arrest Operation (OTT) and the progress of the trial of the corruption case. done openly. Corruption is like rats that are everywhere, whether in a democracy or a totalitarian political system, rats still exist and continue to breed. Corruption has ensnared government leaders at both the central and regional levels. This descriptive research attempts to answer the question, where has the ethicality of corrupt young politicians, who are public officials, disappeared, resulting in the statesman crisis in Indonesia? The results of this research conclude that the ethicality of corrupt young politicians is lost due to unlimited greed because of the opportunity to come to power without accountability and a lack of statesmanlike reasoning.*

**Keywords:** *Ethicality of corrupt young politicians, Power, Statesman crisis*

## Abstrak

Bangsa ini tengah mengalami krisis kepemimpinan, maraknya para pemimpin muda yang muncul di era reformasi kebanyakan bermental politisi. Kepemimpinan politik yang bermental politisi lebih memperhitungkan untung rugi, bagi-bagi kekuasaan, mengamankan kekuasaan politiknya disisi lain Tiada hari tanpa pemberitaan korupsi di berbagai media social, baik terkait dengan keberhasilan KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) maupun jalan nya persidangan kasus korupsi yang dilakukan secara terbuka . Korupsi ibarat tikus yang ada dimana-mana, apakah dalam demokrasi atau sistim politik totaliter sekalipun, tikus tetap ada dan terus berkembang biak. Korupsi telah menjerat pimpinan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah. Penelitian deskriptif ini berusaha menjawab Pertanyaannya, kemana hilangnya etikalitas para politisi muda yang korup, yang merupakan pejabat public tersebut, sehingga berdampak pada krisis negarawan di Indonesia? Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa etikalitas politisi muda yang korup hilang ditelan keserakahan yang tiada batas karena kesempatan berkuasa tanpa diiringi dengan akuntabilitas dan minus nalar negarawan.

**Kata kunci:** Etikalitas politisi muda yang korup, Kekuasaan, Krisis negarawan

## 1. Pendahuluan

Idealisme anak muda yang selalu gelisah terhadap berbagai bentuk kepemimpinan nasional kita. Idealisme kaum muda adalah idealisme yang selalu berbalut dengan berbagai

ketidakpuasan atas kondisi kebangsaan kita yang memang akhir-akhir ini selalu diliputi berbagai ketidakpastian. Misalnya berbagai kegetiran atas tipikal kekuasaan yang steril dari keberpihakan pada kebangsaan dan kerakyatan, yang bermental politisi lebih memperhitungkan untung rugi, bagi-bagi kekuasaan, mengamankan kekuasaan politiknya. Kepemimpinan politik lebih memperhitungkan kalkulasi untung rugi dalam kekuasaan politiknya. Yang penting kekuasaan politik aman dan selamat dari tekanan lawan politiknya. Di negeri ini ruang politik kita terlalu banyak dipenuhi sesaki dengan politisi bukan negarawan Nalar politisi sangat berbeda dengan nalar negarawan. Politisi berjuang untuk kepentingan politik kekuasaan, sedangkan nalar negarawan berjuang untuk politik kebudayaan.

Generasi muda dicita dan dicitrakan menjadi harapan perubahan dan perbaikan peradaban. dapatkah politisi muda menahkodai perubahan agar intisari politik tak hanya kekuasaan, melainkan juga kebaikan bersama? Muda dan menduduki jabatan strategis di partai politik maupun pemerintahan nyatanya tak membuat Nur Afifah Balqis (NAB) masih berusia 24 tahun ketika terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memperbaiki masalah penyelenggaraan negara yang korup. Mereka justru berlaku sama dengan pemain lama dalam melanggengkan penyakit korupsi.

## **2. Metode Penelitian**

Ruang lingkup artikel ini spesifik dari kacamata anak muda dalam melihat krisis kepemimpinan di Indonesia, yang saat ini di era reformasi dibanjiri dengan Kepemimpinan politik yang lebih memperhitungkan kalkulasi untung rugi dalam kekuasaan politiknya, yang korup bukan lagi pada nalar negarawan yang berjuang untuk politik kebudayaan. Dengan pendekatan deskriptif, Mengutamakan data sekunder yang relevan dan terkini untuk memotret fenomena krisis negarawan karena rendahnya etikalitas politisi muda yang korup.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Etikalitas Politisi Muda Yang Korup**

Fakta empiris yang menggambarkan rendahnya etikalitas politisi muda misalnya gagal menjadi calon presiden di sebuah partai politik dan kalah dalam kovensi, tiba-tiba bisa beralih mencari dukungan partai politik lain. Fakta lainnya tampak dari terbongkar korupsi pembahasan anggaran pengalokasian Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) yang melibatkan anggota DPR RI Fraksi PAN Wa Ode Nurhayati dan pengusaha yang juga politisi Golkar Fahd El Fouz. Pada saat itu, Wa Ode sebagai penerima suap baru berusia 30 tahun dan Fahd sebagai pemberi suap berusia 29 tahun. Bahkan, kepala daerah yang mendapat rekor MURI pada 2016 sebagai walikota termuda, yaitu Walikota Tanjungbalai M. Syahril, ditetapkan sebagai tersangka korupsi saat usianya 33 tahun.

(Runi Hariantati, 2003) menjelaskan Term etika (filsafat moral) dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi dasar seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika memberikan dasar moral kepada politik. Menghilangkan etika

dari kehidupan politik berimplikasi pada praktek politik yang bersifat Machavellistis, yaitu politik sebagai alat untuk melakukan segala sesuatu, baik atau buruk tanpa mengindahkan kesusilaan, norma dan berlaku seakan bernuansa positivistik (bebas nilai). Kehidupan politik sebagai salah satu ekspresi – improvisasional – dari kehidupan sosial manusia, meskipun berlaku secara sosial, keterkaitannya dengan yang transenden tidak akan terlepas.

Etika menjadi relevan saat ini dan akan selalu relevan karena kehidupan manusia terus menerus ditandai oleh pertarungan (konflik) antar kekuatan baik (good) dan kekuatan jahat (evil) yang tak pernah henti-hentinya. Etika mendasarkan diri pada rasio untuk menentukan kualitas moral kebajikan maka disebut juga sistem filsafat yang mempertanyakan praksis manusia berkenaan dengan tanggung jawab dan kewajibannya (Soeseno, 1988:13). Atau untuk menggunakan retorika posmodernisme (fungsional), karena persaingan dalam permainan kuasa atau kelompok ekonomi atau budaya tertentu selalu berhasrat merebut supremasi untuk menjadi yang paling dominan. Etika politik dapat memberikan patokan-patokan, orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang memang ingin menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia ( Soeseno, 1988:2) Jika pada dasarnya manusia adalah jahat, maka tak mungkin ada pemerintah. Kemudian, jika semua manusia adalah baik, maka tak perlu ada pemerintahan. Jadi harus diakui bahwa manusia sejati adalah makhluk yang kompleks dan ambivalen, berada di tengah-tengah antara jalan akal budi dan tak berakal budi, antara baik dan jahat, campuran antara egoisme dan kebaikan. Dengan ambivalensi itu manusia dapat mempergunakan kekuasaan dengan baik atau buruk (Hans Kung, 2002)

Menelisik faktor penyebab politisi muda tak jauh berbeda dari pendahulunya penting dimulai dengan melihat motif, dari mana, dan bagaimana mereka memasuki panggung politik. Meski telah banyak dimasuki generasi muda, politisi muda kita banyak yang berasal dari kalangan pengusaha dan dinasti politik. Terlebih mereka yang dengan instan dapat memenangi kontestasi pemilu dan memimpin partai politik di daerah. Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan/peluang (kelemahan sistem, pengawasan kurang, dan sebagainya) dan niat/keinginan (didorong karena kebutuhan dan keserakahan).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Etika merupakan norma dasar yang sangat berpengaruh pada pembentukan karakter bangsa, sedangkan integritas ialah konsistensi dari hati, pikiran, perkataan dan tindakan kita. Disinilah tantangan besar bagi pemerintah Indonesia untuk menguatkan etika dan integritas birokrasi untuk memberantas korupsi hingga ke akarnya. Dengan kata lain, akar permasalahan Korupsi adalah kurangnya etika dan integritas birokrasi.

### **3.2. Kekuasaan Para Politisi Muda**

Setiap kekuasaan menurut (Igles Kleden, 1999) sudah dengan sendirinya menyiapkan jebakan bagi orang yang memilikinya. Semakin besar kekuasaan semakin rumit dan berbahaya jebakan tersebut, sehingga sang penguasa hampir tidak dapat meloloskan diri daripadanya tanpa dibantu orang lain. Untuk seseorang yang berada dalam kekuasaan maka jebakan tidak pernah ditanggapi sebagai jerat penyelewengan, tetapi lebih sebagai privilese dan fasilitas yang dianggap melekat pada kekuasaan. Karenanya menjadi wajar jika selalu saja muncul perilaku

aji mumpung tatkala seorang politisi memegang jabatan politik. Itulah sebabnya setiap kekuasaan, dimanapun dan kapanpun harus dicurigai. Karena jenis penguasa manapun yang dipilih, dia tidak dapat diharapkan untuk memperhatikan kepentingan rakyat dan negara pada setiap saat. Karenanya, sudah sepantasnya kita berkewajiban untuk mengontrol kekuasaan pengelolaan negara dari tingkat paling rendah (Desa) sampai yang paling tinggi (negara). Kekuasaan eksekutif dan legislatif harus tetap dikontrol dan diawasi, karena keduanya sangat berkepentingan dengan pengelolaan kekuasaan negara.

Kekuasaan adalah kompetensi, kemungkinan atau kebebasan untuk menentukan sesuatu, orang atau lingkungan lain. Atau menurut definisi sosiolog klasik Max Weber, kekuasaan adalah setiap kesempatan untuk menetapkan kehendak diri sendiri dalam sebuah hubungan sosial meskipun dihadapkan pada sebuah perlawanan, tak masalah apapun basis kesempatan itu. Dengan demikian setiap sifat orang dapat dipahami dan setiap konstelasi dapat pula dipahami. Dengan asumsi ini mudah mengarahkan dan memposisikan seseorang sesuai dengan ketetapan kehendaknya sendiri dalam situasi tertentu (Winkelman, 1972: 28).

Menurut (Runi Hariantati, 2003) Seharusnya kekuasaan dicari tidak hanya untuk kepentingan sendiri tetapi sebagai alat untuk melayani tujuan manusia. Di segala tingkatan politik, kekuasaan harus dipakai untuk melayani, bukan untuk mendominasi, apapun komitmen pribadinya. Kekuasaan dan dominasi sama sekali tidak identik. Di segala tingkatan politik, apabila orang dapat melihat secara terus menerus bahwa seorang politisi, kelompok politisi atau pemerintah menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mendominasi bukan untuk melayani, maka kekuasaan akan mendominasi pemikiran dan tindakan politik, serta akan menimbulkan kebencian dan permusuhan; sungguh, kekuasaan akan mengakibatkan peperangan, dingin atau panas. Tetapi dimana politisi atau kelompok tertentu atau sebuah pemerintah berusaha untuk melihat bahwa kekuasaan adalah untuk melayani, bukan untuk mendominasi, maka dalam perjuangan kekuasaan mereka membantu memanusaiakan persaingan yang mematikan dan mempromosikan penghormatan dan penghargaan pada orang lain, mediasi, pengertian dan perdamaian (Hans Kung, 2002)

Dengan demikian, harapan politisi muda dapat mengubah “dari dalam” sebagaimana yang kerap digaungkan memerlukan prasyarat penting yang tak bisa ditawarkan, yaitu pembenahan serius partai politik dan pemilu. Tanpa pembenahan tersebut, politisi muda hanya akan menjadi pendatang baru yang tak ubahnya politisi pendahulunya. Di sisi lain, politisi muda juga perlu menyadari bahwa mengelola partai dan negara lebih-lebih untuk melayani publik, bukan untuk memperkaya diri sendiri.

### **3.3. Krisis Nekarawan Dari Para Politisi Muda**

Politik selalu mempunyai logikanya sendiri yang seringkali unpredictable (tidak teramalkan). Logika politik adalah logika (kalkulasi) kekuasaan. Logika tersebut didukung dengan –meminjam terminologi Nietzsche- naluri abadi dari manusia yaitu kehendaknya untuk berkuasa (will to power). Dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan, maka politisi

biasanya akan menggunakan cara-cara yang tidak masuk akal bahkan cenderung melupakan hati nurani.

(Imawan, 2000) sangat tepat ketika mengatakan bahwa demi kekuasaan, aktor politik rela berbohong dan meraihnya melalui prinsip menghalalkan segala cara. Maka tidak berlebihan bila orang awam berpendapat, bahwa untuk menjadi politikus ulung seseorang harus mempunyai bakat kriminal. Logika yang demikian mengubah 'panggung' politik menjadi – meminjam istilah Komaruddin Hidayat (Kompas, 3/10/03) panggung gladiator. Yaitu, menjadi arena perebutan kekuasaan dengan cara saling memfitnah, menjegal dan membunuh lawan.

(Listiyono Santoso, 2013)Negeri ini menjadi surplus politisi tetapi minus negawaran. Stok politisi sangat melimpah, tapi negeri ini kehilangan politisi yang berjiwa negarawan. Seorang politisi hanya akan berkuat pada problem kekuasaan (kursi) yang sifatnya lebih kalkulatif dan transaksional. Realitas politik kita sebenarnya membenarkan situasi adanya hiruk pikuk pertarungan perebutan kursi kekuasaan (kepresidenan maupun parlemen), sehingga melupakan tugas pokoknya reformasi kehidupan berpolitik secara mendasar. Sementara, seorang negarawan jelas tidak lagi beorientasi pada kursi kekuasaan, melainkan lebih disemangati oleh keikhlasan berpolitik untuk kepentingan bangsa dan negara an sich yang steril dari intervensi partai politik maupun kepentingan tertentu di luar kepentingan negara, meski mereka berasal dari partai politik tertentu.

Dalam konteks keindonesiaan, maka seorang pemimpin (nasional) haruslah menjadikan Pancasila sebagai visi ideologis. Pemimpin nasional haruslah yang memiliki kemampuan menerjemahkan nilai-nilai Pancasila sebagai praksis hidup kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Saatnya, kita memilih pemimpin nasional yang menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai dalam menjalankan aktivitas kebangsaan dan kenegaraan. Siapapun dia, setelah terpilih secara demokratis, haruslah kita dukung dan dikawal agar tidak menyelewengkan kekuasaannya. Tidak boleh lagi terjadi politik pembiaraan terhadap kekuasaan. Karena kultur pembiaraan justru akan kian menjerumuskan dan menyelewengkan tiap kekuasaan. Saatnya kita peduli terhadap kekuasaan bukan untuk berebut dan merebut kekuasaan, melainkan agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Kaum muda memiliki tanggungjawab untuk mengawal kekuasaan agar benarbenar berpihak bagi kebangsaan kita. (Listiyono Santoso, 2013)

Mengapa kita butuh pemimpin yang kuat? (Sukardi Rinakit, 2008)mengatakan dalam sejarah filsafat politik modern, pemikiran tentang kepemimpinan politik juga dimulai dari tokoh besar. John Gardner dalam *On Leadership* (1990) menulis, "Sebagian besar dari kita, meski tersembunyi, memiliki ingatan akan tokoh yang superkuat seperti dewa yang melindungi kita semasa kecil, dan sebagian dari kita tumbuh besar dengan tetap mengharap munculnya tokohtokoh seperti itu."

Siapakah pemimpin yang memiliki karakter kuat itu. Penelitian (Listiyono Santoso, 2013) Setidaknya ada beberapa kondisi: a) dari sisi sang pemimpin harus memiliki karakter tambahan yang disebut sebagai kemampuan transformatif. Ada dua kategori pemimpin dalam

konteks ini, pemimpin yang transaksional dan pemimpin yang transformatif (James M Burns, Leadership, 1978). Pemimpin yang transaksional menggambarkan hubungannya dengan konstituen sebagai transaksi jual-beli. Pemimpin membeli suara dan konstituen menjual suara. Akibatnya, semua kebijakan politiknya hanya bersifat jangka pendek, sering kontradiktif, dan menguntungkan kelompok tertentu saja. Pemimpin yang transformatif lebih tanggap terhadap "kebutuhan yang tersembunyi", yang di dalamnya ada a) pertimbangan pencerahan politik, mendorong konstituen untuk menemukan jalannya sendiri, dan lain-lain. b) kepemimpinan nasional juga harus dilihat bukan hanya dalam urusan pemilu presiden atau legislatif, tetapi juga kepemimpinan yang muncul di arena masyarakat sipil. c) Agar kepemimpinan yang kuat tidak mendistorsi demokrasi, harus ada kekuatan oposisi (baik dalam masyarakat maupun parlemen) yang efektif dan konstruktif. Kekuatan oposisi dalam masyarakat terutama diperlukan dalam bentuk koalisi antara kekuatan masyarakat yang prodemokrasi. Mereka adalah kekuatan yang peduli terhadap isu-isu publik (Nanang P Mugasejati, Kompas, 2008).

Berdasarkan pada kondisi tersebut dan keyakinan bahwa reformasi merupakan titik awal bagi kebangkitan nasional kita, setidaknya ada empat tanggung jawab yang diemban oleh pemimpin nasional. Pertama, meneruskan komitmen terhadap perjuangan moral. Kedua, melanjutkan dan meningkatkan kualitas reformasi. Ketiga, mewujudkan kegemilangan masa depan atas masa lalu. Dan keempat, mewujudkan ke menangan nurani rakyat.

#### **4. Kesimpulan**

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa etikalitas politisi muda yang korup hilang ditelan keserahan yang tiada batas karena kesempatan berkuasa tanpa diiringi dengan akuntabilitas dan minus nalar negarawan. Karena Etika dan integritas yang akan memperkuat kinerja birokrasi dalam mensukseskan visi dan misi pemerintah Republik Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi. Agar dibangun dan mengembangkan instrumen, proses, dan struktur guna membangun etika dan sistem integritas birokrasi untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi bagi politisi muda cikal bakal negarawan yang akan datang.

#### **Daftar Pustaka**

- Hans Kung. (2002). Etika Global. Qalam.
- Ignes Kleden. (1999). Menulis Politik Indonesia Sebagai Utopia. Buku Kompas.
- Imawan, R. (2000). Membedah Politik Orde Baru. Pustaka Pelajar.
- Iswarja.F. (1980). Pengantar Ilmu Politik. Bina cipta.
- Listiyono Santoso. (2013). Dicari Sosok Negarawan Untuk Indonesia. Jurnal Prodi PPKn, vol.2 no.1.
- Runi Hariantati. (2003). Etika Politik Dalam Negara Demokrasi. DEMOKRASI, Vol.II.No.1.
- Sukardi Rinakit. (2008). Tuhan Tidak Tidur. Buku Kompas.